



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 / DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 07/DPRD.LPG/III.01/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Mei 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Ir. Hi. JOHAN SULAIMAN, M.M

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 10 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 16 Mei 2017

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur kepada DPRD Provinsi, sebagai "*pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran*", merupakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya secara teknis diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat, merupakan bagian dari instrumen *fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan*, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005.

Pada sisi berikutnya, hakikat fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai "*kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah*", adalah manivestasi dari implementasi mekanisme *check and balances* sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas dan tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, guna peningkatan kualitas hidup

masyarakat secara luas, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*suistainable development*).

Pada bagian ini, perlu ditegaskan bahwa tujuan evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*, sebagai penjabaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, dengan berpedoman kepada *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)*, diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Urgensi atas penegasan tersebut adalah penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Penekanan atas hal ini bersifat krusial mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *a qua* menegaskan bahwa LKPj mencakup uraian mengenai kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD dalam rangka rekomendasi perbaikan sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *a qua*.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui kesempatan ini, kami berharap kerjasama antar-kelembagaan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung yang selama ini telah terbina dengan baik, dapat terus kita tingkatkan, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, ditengah-tengah kompleksitas kendala, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya.

II. MEKANISME KERJA

Memenuhi amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *aqua* Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007, pada tanggal 26 April 2017 terbit Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor. 07/DPRD.LPG/III.01/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada tanggal 28 April s.d 15 Mei 2017;
2. Merumuskan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dan menuangkannya melalui laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 16 Mei 2016; dan
3. Tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, dinyatakan berakhir, setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016.

Adapun komposisi dan personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. MOZES HERMAN, MM
Wakil Ketua : EDI RUSDIANTO, SH, MM
Sekretaris : Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos
Anggota : 1) Hi. MARDANI UMAR, SH, MH
2) Hi. MC. IMAM SANTOSO, SH, MH
3) H. PUTRA JAYA UMAR
4) Hi. MUSWIR, A.Md
5) H. M. RIZAL, SE
6) AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH
7) Hi. ADE UTAMI IBNU, SE
8) HIDIR IBRAHIM, M.Si

- 9) Dra. MARTALENA DJAFAR
- 10) Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM
- 11) Drs. YOSE RIZAL, MM
- 12) ALI IMRON, S. Fil
- 13) Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM

Guna berjalannya efektifitas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, agar memiliki skema dan fokus yang kuat dan jelas, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, sebagaimana sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Tim Ahli/Kelompok Pakar untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Khusus Pembahasan LKPj, dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017;
2. Rapat Internal bersama Tim Ahli/Kelompok Pakar, dalam rangka penetapan tolak ukur, dan indikator kinerja dalam Pembahasan LKPj, dilaksanakan tanggal 02 Mei 2017;
3. Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Pembahasan LKPj dengan jajaran Pimpinan OPD, dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi, guna kompulasi data, informasi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan kondisi objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 05 Mei 2017;
4. Rapat Konsultasi Panitia Khusus Pembahasan LKPj dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 10 Mei 2017;
5. Perumusan Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Khusus Pembahasan LKPj, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017;
6. Penyerahan Laporan Panitia Khusus Pembahasan LKPj kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017;
7. Pemaparan Laporan Panitia Khusus Pembahasan LKPj kepada Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi/Komisi dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017; dan
8. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Laporan Panitia Khusus Pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017

III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN

Dalam rangka terpenuhinya amanat peraturan perundang-undangan, tujuan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada TA. 2016;
2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kelemahan, kendala, hambatan, dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan TA. 2016;
3. Solusi terhadap permasalahan, kendala, dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah TA. 2016; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, terjadi penguatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah penyempurnaan tata-laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung, dalam rangka *perkuatan sistem penatausahaan pengelolaan penerimaan dan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.*

Rekomendasi DPRD atas pelaksanaan LKPj Provinsi Lampung TA 2016 ini telah berhasil disusun, setelah sebelumnya dilakukan kajian atau evaluasi atas laporan LKPj yang diberikan dan ditambah dengan berbagai informasi, laporan dan hasil-hasil kajian pembangunan lainnya, yang dipadu padankan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung lainnya.

Rekomendasi atas LKPj Provinsi Lampung TA 2016 ini terdiri dari 2 bagian yang tidak terpisahkan yaitu Rekomendasi dan hasil analisa / kajian atas LKPj yang secara detil mengevaluasi/mengamati kinerja per OPD permasalahan dan rekomendasinya dalam sebuah bagan/table.

Isi rekomendasi ini terdiri dari 9 bagian rekomendasi DPRD sesuai dengan laporan LKPj, yaitu rekomendasi atas:

1. Penyampaian LKPj oleh Pemerintah Daerah
2. Kondisi Umum Daerah: Kondisi Geografis, Gambaran Umum Demografi, Kondisi Ekonomi Terkini, dan Capaian Makro Pembangunan di Daerah
3. Pelaksanaan RPJMD, Visi dan Misi KDH, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, dan Tema Serta Prioritas Pembangunan
4. Pelaksanaan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Oleh Pemerintah Daerah
5. Leadership Kepala Daerah Dalam Upaya Mengatasi Permasalahan-Permasalahan Pembangunan Di Lampung
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang dibagi atas bidang Sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi Keuangan Daerah, infrastruktur dan SDA Lingkungan.
7. Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan Yang Diterima.
8. Rekomendasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
9. Kesimpulan dan Harapan

IV. REKOMENDASI DPRD LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TERHADAP NOTA PENJELASAN LKPJ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

A. TANGGAPAN TERHADAP PENYAMPAIAN LKPJ OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih meningkatkan **koordinasi dan komunikasi** secara **serius dan optimal dengan langkah-langkah kongkrit** dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung dan koordinasi dengan seluruh OPD di pemprov Lampung.
2. Penyampaian LKPJ ke DPRD harus tepat waktu sehingga pembahasan dan evaluasi efektif.
3. Isi yang terkandung dalam Laporan LKPJ yang akan datang perlu disinkronisasi/ ada standarisasi/ada panduan yang lengkap terutama memuat tentang: (a) indikator yang ingin dicapai; dan (b) capaian kinerja yang terukur.

4. Sebaiknya pada LKPJ setiap OPD yang akan datang, kinerja terkait Program/Kegiatan aparatur, seperti urusan-urusan administrasi pemerintahan, peningkatan disiplin aparatur peningkatan SDM aparatur, dll, tidak perlu diuraikan secara detil, tetapi yang penting dilaporkan adalah kinerja atau capaian program/kegiatan yang langsung menyentuh pelayanan ke masyarakat.

B. REKOMENDASI DPRD TERHADAP KONDISI UMUM DAERAH, TERUTAMA KONDISI GEOGRAFIS, GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI, KONDISI EKONOMI TERKINI, DAN CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DI DAERAH

1. Menciptakan program-program pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan langkah-langkah kongkrit.
2. Pertambahan jumlah penduduk perlu diantisipasi melalui peningkatan program Keluarga Berencana.
3. Pemerintah Provinsi harus mengupayakan membuka lapangan kerja baru melalui investasi dan meningkatkan jumlah kewirausahaan.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan (formal dan informal).

C. REKOMENDASI DPRD TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD, VISI DAN MISI KDH, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH, DAN TEMA SERTA PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Visi, Misi, Strategi, dan Prioritas harus dapat dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kongkrit yaitu program/kegiatan yang jelas bentuknya yang menyelesaikan persoalan di masyarakat.
2. Prioritas pembangunan daerah per tahun jangan terlalu banyak dan melebar, sedikit saja **tetapi jelas apa** yang akan diprioritaskan 1 tahun ke depan dengan anggaran yang tersedia.

D. REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi sumber –sumber keuangan daerah melalui system informasi yang ada, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
2. Lakukan optimalisasi serapan anggaran dengan langkah langkah kongkrit karena penyerapan anggaran lambat hingga Triwulan III/2016
3. Terus mengupayakan mencari alternative sumber-sumber pendapatan baru yang kreative dan inovatif tanpa menekan dunia usaha misal: BUMD infras, wisata alam, wisata kuliner, wisata konservasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa merugikan masyarakat dan iklim investasi, peningkatan kulaitas SDM.
4. Alokasi Belanja yang lebih urgent, Porsi belanja langsung harus lebih berimbang dibanding belanja tidak langsung, Belanja pegawai dikurangi, belanja modal ditingkatkan.

E. REKOMENDASI TERHADAP LEADERSHIP KEPALA DAERAH DALAM UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI LAMPUNG

1. Gubernur diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi pembangunan, baik koordinasi dengan OPD nya, maupun aktif berkoordinasi dengan kepala daerah seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
2. Gubernur harus lebih memberikan arahan yang tegas tentang pembangunan yang hendak dicapai serta membagi tugas dan wewenang karena pembangunan harus terintegrasi saling mengisi, saling mendorong dan saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri antar OPD atau antar kabupaten/kota

F. REKOMENDASI TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

1. SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, HUKUM

Secara umum, penyelenggaraan urusan bidang sosial dan budaya, politik, hukum, dan pemerintahan, belum sepenuhnya mendukung, konsistensi, selaras, dan sejalan dengan arah kebijakan, sasaran pembangunan, program unggulan, dan pencapaian indikator kinerja program dan indikator kinerja daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019. Untuk itu rekomendasi DPRD Provinsi Lampung sbb:

- a. Menyusun dan merealisasikan RKPD harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD dan RKPD
- b. Format pelaporan OPD dalam rangka LKPj perlu penyeragaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sebagian besar informasi program dan kegiatan urusan bidang sosial dan budaya, politik, hukum, dan pemerintahan belum dapat menggambarkan aktivitas dan hasil yang progresif berdaya daya ungkit tinggi untuk menggapai kemajuan dalam aspek perbaikan dan peningkatan derajat pendidikan, derajat kesehatan, demokratisasi lokal, reformasi birokrasi, pelayanan prima, penurunan angka kriminalitas, dan *law enforcement*,
- d. Usulan program/kegiatan harus inovatif, pencapaian target kinerja pembangunan, perbaikan kesejahteraan rakyat dan kepuasan masyarakat serta kemajuan daerah.
- e. Karena IPM Lampung masih terendah se-Sumatera, maka upayanya **pertama**, pemetaan posisi IPM kabupaten/kota untuk memperoleh aspek-aspek yang melemahkan. **Kedua**, seluruh program di bidang ini harus berorientasi dan berbasiskan pada perbaikan IPM dan SDGs,
- f. Pemprov harus melakukan kajian dan pembenahan terhadap seluruh indikator program (kuantitatif dan kualitatif) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik capaian indikator, seperti indikator jumlah lembaga ekonomi pedesaan dan jumlah lembaga ekonomi desa yang dikembangkan, dll
- g. Kepala daerah dan OPD belum memiliki komitmen tinggi dan aksi nyata untuk mewujudkan **agenda reformasi birokrasi daerah** tersebut. Komitmen itu bisa dalam bentuk sbb: lelang jabatan, fit and proper test

- h. Pemprov Lampung harus melakukan reformasi birokrasi seperti “lelang jabatan” pada promosi atau pengembangan karir pegawai di lingkungan Pemprov Lampung.
- i. Untuk mencegah disintegrasi bangsa, maka rekomendasi terkait itu :**pertama**, partisipasi pemuda dalam pembangunan serta pencapaian prestasi olahraga pada tingkat regional, nasional dan internasional.**Kedua**, meningkatkan jalinan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem dan kualitas olahraga di Provinsi Lampung sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM serta aspek lainnya.
- j. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya tahun 2016, belum berjalan optimal, melalui 10 program dan 39 kegiatan, tidak memberikan informasi apapun terkait perkembangan kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota, tidak jelas penurunan KDRT di Lampung, jumlah mitra kerja yang berperan aktif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan berapa forum anak yang sudah dibentuk. Atas kondisi tersebut, DPRD Lampung merekomendasikan: **pertama**, agar OPD memperbaiki indikator kuantitatif keberhasilan program dan kegiatan mulai dari perkembangan perkembangan kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota, penurunan KDRT di Lampung, mitra kerja yang berperan aktif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan forum anak yang sudah dibentuk. **Kedua**, mendorong dan bekerjasama dengan kab/kota untuk merealisasikan kabupaten/kota ramah anak di Provinsi Lampung.
- k. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Provinsi Lampung perlu mendapatkan perhatian serius karena sering terjadi konflik horizontal. Pemerintah Provinsi Lampung masih belum optimal dalam pelaksanaan RKPD, program dan kegiatan yang bernilai strategis untuk mencegah konflik dan justru ada program yang terabaikan seperti Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi konflik sosial. Atas dasar kondisi tersebut, DPRD Lampung merekomendasikan agar Kepala Daerah dan OPD bidang kesbangpol untuk memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergisitas dengan berbagai instansi baik kab/kota maupun instansi vertikal untuk bersama-sama memantapkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman konflik sosial berlatar belakang SARA, ekonomi, dan dinamika sosial politik, termasuk antisipasi pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Utara.

- l. Kondisi pembangunan demokrasi Lampung di ukur dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2015 sebesar 65,95 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 5,67 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2014 sebesar 71,62. Penurunan ini mesti menjadi perhatian Pemprov Lampung melalui OPD yang terkait bidang sosial dan politik serta sektor lainnya. Atas kondisi ini, DPRD Lampung merekomendasikan: **pertama**, melakukan pemetaan aspek, variabel, dan indikator yang berkontribusi atas penurunan IDI Lampung. **Kedua**, menyusun program dan kegiatan lintas kab/kota, multi-stakeholder masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama memperbaiki aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi demi terwujudnya perkembangan demokrasi di Lampung yang lebih baik.
- m. Penyelenggaraan urusan bidang satuan polisi pamong praja ditandai dengan 3 (tiga) program pokok, yaitu peningkatan perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan penegakkan peraturan perundang-undangan semua sudah dilaksanakan dengan capaian realisasi fisik diatas 97%. Ada beberapa catatan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, yaitu: **pertama**, tidak ada indikator yang lebih tepat untuk menggambarkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, agar kegiatan dan anggaran lebih tepat sasaran (ada dampak dan manfaat) dimasyarakat. **Kedua**, berpotensi besar terjadi pemborosan anggaran, akibat program, kegiatan dan indikator yang tidak jelas arahnya. Atas dasar itu, DPRD Lampung merekomendasikan: **pertama**, melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap indikator yang lebih tepat untuk menggambarkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketertiban, agar kegiatan dan anggaran lebih tepat sasaran (ada dampak dan manfaat) dimasyarakat. **Kedua**, melakukan pembenahan manajemen kepegawaian di lingkungan Pol PP mulai dari rekrutmen pegawai honorer hingga pengembangan serta penugasan polisi pamong praja yang benar-benar efektif melalui pemetaan kinerja pegawai, pemberian reward and punishment sesuai undang-undang serta menyusun rasio kebutuhan pegawai dengan tugas-tugas yang tersedia.
- n. Evaluasi umum yang dapat dilakukan atas penyelenggaraan urusan sosai adalah sebagai berikut: **pertama**, 5 (lima) program yang tidak ada dalam RKPD 2016, sehingga sulit diukur tingkat capaian antara perencanaan dengan realisasi. **Kedua**, semua program dan kegiatan tidak memiliki indikator program yang terukur dan sesuai substansi program, sehingga

potensial menyebabkan pemborosan anggaran daerah dan mengancam kegagalan pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Lampung. Atas dasar kondisi itu, DPRD Lampung merekomendasikan hal sebagai berikut: **pertama**, agar OPD bidang sosial untuk merancang program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD, karena pada tahun 2016 ada 5 (lima) program yang tidak ada dalam RKPD 2016, sehingga sulit diukur tingkat capaian antara perencanaan dengan realisasi. **Kedua**, melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap indikator keberhasilan program dan kegiatan dan capaian agar sejalan dengan indikator dalam RPJMD 2014-2019 dan RKPD Tahun 2016, apabila ini diabaikan akan potensial menyebabkan pemborosan anggaran daerah dan mengancam kegagalan pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Lampung.

- o. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil, masih ditemui sejumlah masalah administrasi kependudukan dan capil diberbagai Kabupaten, untuk DPRD Lampung merekomendasikan: **pertama**, perlunya peningkatan fasilitasi provinsi, utamanya melalui fungsi pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga bagi kabupaten/kota dapat terbantu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. **Kedua**, perlunya peningkatan fungsi koordinasi dan pengawasan atas pengoperasian SIAK kab/kota mengingat data ini oleh Kementerian akan dimanfaatkan untuk: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi lokal, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

2. EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

A. EKONOMI:

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016 mencapai **5,15%**. Angka ini memang di atas rata-rata nasional dan merupakan urutan keempat diantara Provinsi-Provinsi di Sumatera. PDRB Lampung 2016, tercapai sebesar **Rp 281.113 M**, dengan sektor industri pengolahan dan transportasi tumbuh. Kita mengapresiasi pencapaian ini. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam kinerja perekonomian ini. Dengan potensi yang demikian besar dan luas, pencapaian itu tidak maksimal dan masih bisa ditingkatkan asalkan **FOKUS** , baik arahnya maupun upayanya. Dengan pencapaian seperti ini, perekonomian Lampung sebenarnya jauh bisa lebih dari pencapaian itu karena potensi yang dimiliki besar.

Ketimpangan pendapatan di antara penduduk dan pemerataan hasil pembangunan di kabupaten/kota se Provinsi Lampung masih cukup besar yang ditandai dengan angka Index **Gini Ratio = 0,38**, pendapatan perkapita penduduk masih **Rp 34,26 juta**, angka kemiskinan sebesar 13,86 % dan cenderung meningkat dan kemiskinan terbanyak di pedesaan, sementara target nasional hanya 8 %. Penduduk miskin terbanyak di pedesaan. Mereka miskin karena angka pengangguran di Lampung 4,62% dimana . Tingkat Partisipasi kerja (TPK) tahun 2016 Lampung 69,61. Artinya dari 100 orang pencari kerja yang bekerja sebanyak 70 orang sisanya 30% menganggur.

Melihat hal-hal di atas, maka rekomendasi untuk memperbaiki perekonomian Provinsi Lampung ke depan adalah sbb:

- a. Pemerintah provinsi Lampung harus fokus dan sungguh-sungguh mengupayakan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ini dengan program-program dan kegiatan yang kongkrit
- b. Buat program/kegiatan yang mampu membuka lapangan kerja baru
- c. Menarik dan membuka peluang investasi seluas luasnya sehingga mau masuk ke Lampung sehingga dapat menyerap pengangguran dan memberikan pekerjaan yang layak, melalui promosi potensi investasi, permudah perizinan serta kenyamanan berinvestasi lainnya, alfasilitas jalan yang layak, pasokan energy yang cukup, memberantas high cost, pungli dll.
- d. Memperbaiki kualitas pendidikan dan menambah skill pekerja/penduduk sehingga mereka dapat diterima di pasar kerja,
- e. Mendekati perusahaan agar mempekerjakan TK lokal atau setempat
- f. Memberikan tambahan modal bagi UMKM, bukan bantuan sekedarnya dalam APBD, tetapi memang langkah signifikan bantuan teknis dan permodalan hingga pemasaran. Juga bekerjasama dengan pihak perbankan di Lampung mengarahkan program-program CSR di Lampung untuk membangun UMKM.
- g. Pemerintah Provinsi harus membuka pasar-pasar baru, membantu pemasarannya dan teknik pengemasannya.
- h. Selain itu, program-program pembangunan sebaiknya diarahkan ke pedesaan yang banyak penduduk miskinnya.

B. KEUANGAN DAERAH:

Target pendapatan daerah TA 2016 tidak tercapai. Pendapatan daerah TA 2016 sebesar Rp 5,585 trilyun. Walau pendapatan daerah ini meningkat sebesar

16,62% dibandingkan tahun 2015, namun bukan karena peningkatan kinerja PAD, karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah malah menurun, dibandingkan TA 2015, hanya 4,2%. Target perolehan dana perimbangan tidak tercapai yaitu dari target Rp 3 triliun hanya terealisasi Rp 1,78 triliun.

Target serapan belanja daerah, **tidak tercapai**. Target belanja ditetapkan dari Rp 5,2 triliun namun hanya terserap Rp 4,779 triliun atau 90%. Alokasi belanja pun masih didominasi oleh **Belanja Tidak Langsung** sebesar 70%, dan **Belanja Langsung** hanya 30%. Dari Belanja Langsung tersebut, untuk belanja modal mencapai Rp 1 triliun atau 20%. Surplus anggaran sebesar Rp 803 milyar dan pembiayaan bersih Rp 92 milyar. Surplus anggaran yang terlalu besar bisa mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal. Untuk itu rekomendasi yang diberikan di bidang keuangan daerah ini:

Rekomendasi untuk pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Optimalisasi penggalan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tidak menghambat iklim investasi di Lampung
2. Pengelolaan anggaran agar dilakukan lebih transparan dan akuntabel
3. Tingkatkan daya serap anggaran terutama sejak Triwulan II
4. Harus dilakukan *Spending Review* (review atas seluruh pengeluaran belanja daerah) agar anggaran yang terbatas ini mempunyai manfaat dan multiplier effect yang besar, melalui alokasi hanya untuk belanja yang urgent /prioritas/penting
5. Porsi belanja langsung harus lebih berimbang dibanding belanja tidak langsung
6. Terus kreatif dan inovatif mencari alternative sumber-sumber pendapatan baru yang tanpa menekan dunia usaha mis : BUMD infras, wisata alam ,wisata kuliner,wisata konservasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa merugikan masyarakat dan iklim investasi,peningkatan kualitas SDM

C. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur terutama jalan dan jembatan harus mendapat prioritas utama, karena merupakan infrastruktur untuk memajukan seluruh wilayah. Selanjutnya kebutuhan listrik dan air bersih juga harus mendapatkan perhatian lebih.

D. SDA dan LINGKUNGAN

Sumber daya alam Lampung sangat melimpah, namun pemerintah daerah belum optimal mengembangkannya. Pemerintah daerah harus membuka peluang-peluang kerjasama dengan investor. Pemeliharaan lingkungan dan program-program inovatif untuk mengantisipasi bencana

G. REKOMENDASI TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

Selama tahun 2016, Provinsi Lampung telah menjalankan 8 program/kegiatan **Tugas Pembantuan** yaitu di Dinas Perkebunan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketenaga Kerjaan, Pekerjaan Umum, Ketransmigrasian, Peternakan dan Penanaman Modal.

Rekomendasi dalam tugas pembantuan ini :

1. Sebaiknya program/kegiatan , objek atau jenis komoditas yang dibantu ,lokasi dan SDM penerima manfaat dari program dll, sudah diseleksi secara ketat oleh pemrov dalam hal ini OPD terkait, sehingga dampak program Tugas Pembantuan betul betul dirasakan/bermanfaat dan memang dibutuhkan masyarakat, keberlangsungan program terjamin setelah bantuan pemerintah pusat berakhir bahkan jika perlu makin meningkat.
2. Program/kegiatan yang dijalankan dalam Tugas Pembantuan ini tidak tumpang tindih /over lapping dengan kegiatan yang sudah dilakukan OPD dengan dana APBD provinsi Lampung, tetapi memperluas/mengembangkan.

H. REKOMENDASI TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Selama Tahun 2016 terdapat 5 bentuk kerjasama antar dan 4 kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah dalam bidang /sektor: Pariwisata dan Eko Kreative, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak,Perhubungan, Kesehatan,Transmigrasi,

Rekomendasi dalam hal kerjasama pemrov Lampung ini :

1. Harus saling menguntungkan
2. Ada alih teknologi /alih pengetahuan
3. Ada hasil yang signifikan dari kerjasama itu dan hasil kerjasaman itu ada tindak lanjut nya (**follow up**) secara mandiri ketika kerjasama ini berakhir .
4. Ada pihak yang mengevaluasi dampak dari kerjasama ini

I. KESIMPULAN DAN HARAPAN

Secara umum, LKPj ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung sudah BAIK , namun dengan beberapa catatan, yaitu :

1. Menjalankan pembangunan ini harus lebih terintegrasi , lebih focus dan terarah
2. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung serta dengan seluruh OPD di bawahnya harus lebih ditingkatkan sehingga terarah dan terintegrasi

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Ir. Hi. JOHAN SULAIMAN, M.M

**PENYUSUNAN RUMUSAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TA 2016**

A. Tanggapan Terhadap Penyampaian LKPJ oleh Pemerintah Daerah

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
1	Dukungan dan Kerjasama SKPD Terkait	Ada beberapa SKPD masih terlambat dalam penyampaian evaluasi kinerja tahunan, dan format laporan kinerja bervariasi sehingga ada kesulitan dalam meng evaluasi kinerja	Koordinasi dengan SKPD perlu ditingkatkan Perlu sinkronisasi dalam penyusunan laporan kinerja, seperti ada indikator yang ingin dicapai , capaian kinerja yang terukur.
2	Substansi Laporan Yang Disampaikan	Substansi laporan sudah sesuai dengan aturan , hanya saja format laporan setiap SKPD yang belum seragam	Perlu ada panduan unsur-unsur apa saja yang harus termuat dalam penyusunan laporan , sebaiknya hanya dijelaskan capaian program yang langsung untuk kepentingan / pelayanan publik saja. Kinerja Program Aparatur, spt urusan administrasi pemerintahan, peningkatan disiplin aparaturnya, peningkatan SDM aparaturnya , tidak perlu diuraikan
3	Waktu Penyampaian Laporan	Waktu penyampaian laporan sangat terbatas sehingga terkesan terburu buru	Sebaiknya penyampaian laporan lebih tepat waktu sehingga evaluasi oleh DPRD bisa dilakukan lebih optimal
4	Mekanisme dan Tata Cara Penyampaian	Tidak ada masalah dalam mekanisme dan tata cara penyampaian	OK
5	Komunikasi antara Pansus /Komisi DPRD dengan Pemda	Komunikasi kurang optimal	Perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi lebih optimal
6	Kesesuaian Laporan dengan Regulasi yang ada	Laporan sudah sesuai dengan regulasi	OK

B. Rekomendasi DPRD Terhadap:Kondisi Umum Daerah ,terutama geografis, demografi,kondisi ekonomi terkini,an capaian makro ekonomi pembangunan

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
1	Gambaran Umum Daerah Saat ini	Secara umum kondisi propinsi Lampung saat ini ada perkembangan jika dibandingkan beberapa periode lalu. Misal , ada bandara yang bagus, flyover, ada mal ,industri, tetapi perkembangannya lambat dibandingkan potensi yang ada (auto pilot). Pembangunan terlihat hanya di kota-kota saja dan jalan lintas kabupaten/kotya, tetapi di dalamnya seperti di pedesaan, masih banyak penduduk miskin, kemiskinan bertambah, ketimpangan pendapatan , ketimpangan antar wilayah, pengangguran tinggi. Investasi yang masuk selama tahun 2016 terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki prioritas / tema pembangunan daerah dan sasaran pembangunan Lampung per tahun (buat prioritas) 2. Beri arahan pembangunan Lampung yang jelas Mau dibawa kemana Lampung ke depan ? 3. Bekerja lebih keras dan lebih focus 4. Program/kegiatan harus kreatif dan inovatif bukan <i>copaste</i> atau as business as usual
2	Gambaran Umum Kondisi Geografis Daerah	Secara umum kondisi geografis Lampung masih terjaga dan kondusif tetapi perlu ada antisipasi pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan b. Pencemaran air dan udara c. Kerusakan resapan air d. Antisipasi banjir dan bencana e. 	Ciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
3	Gambaran Umum Demografi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Pertambahan jumlah penduduk perlu diwaspadai b. Angka ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif)(dependency ratio) c. Kulaitas Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pertambahan jumlah penduduk perlu diantisipasi →program KB ditingkatkan b. Pemerintah propinsi harus mengupayakan membuka lapangan kerja melalui investasi dan kewirausahaan c. Jenis Lapangan Kerja yang memadai d. Akses , kuantitas dan kualitas pendidikan (formal dan informal) ditingkatkan
4	Gambaran Umum Kondisi Makro Ekonomi Terkini dan Capain Makro Pembangunan Lampung	Secara umum kondisi ekonomi Lampung selama tahun 2016 iri menurun yaituhanya 5,1% yang biasanya 5,6 -5,7%. Hal ini memang dipengaruhi oleh perekonomain	<p>Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas (rigid) sehingga tahan lama</p> <p>Perbaiki dan pembuatan jaringan irigasi,</p>

		<p>dunia dan Indonesia yang juga masih turun.</p> <p>Namun ada beberapa indikator eko makro yang harus mendapat perhatian serius dari penda Lampung karena penuurnan PE global ini, yaitu: tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan pembanguann antar wilayah yang meningkat terlihat dari Koef Gini mencapai 3,8. Demikian juga tingkat pengangguran relative tinggi. Kondisi infrastruktur masih bermasalah mulai dari pasokan listrik yang masih terbatas, jaringan jalan baik kualitas dan kuantitas yang kurang,</p> <p>Pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan lapangan kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja</p> <p>Banyajk HGU /HGB industri yang mulai berakhir → berpotensi kerusakan /penyerobotoan tanah menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Kasus ganti rugi tanah utk jalan tool yang masih bermasalah di beberapa ruas jalan tool sehingga proyek jalan tool terhambat.</p> <p>Dari sisi produksi, turunnya kontribusi sektor pertanian thd PDRB tetapi belum bisa digantikan secara signifikan oleh sektor agro industri atau industri pengolahan.</p> <p>Turunnya kinerja perdagangan luar negeri Lampung (ekspor dan impor) akibat terpengaruh belum pastinya permntaan dari LN</p>	<p>Menambah pasokan listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi di bidang Energi dan Energi Terbarukan 2. Pembangunan dimulai dari desa (Gerbang Desa) 3. Pemberdayaan masyarakat pedesaan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan pemerintah desa b. Pengembangan kewirausahaan c. Bantuan modal bagi UKM d. Pemberdayaan BUMDesa 4. Pembangunan sektor pariwisata lebih serius dan professional 5. Pengembangan Sektor Agro Industri melalui <ol style="list-style-type: none"> b. Komoditas yang Bernilai tambah c. Perbaiki Kualitas komoditas d. Sistem Zona Lahan Pertanian dan Perkebunan e. Pertanian terpadu f. Pertanian Moder (hydropinik, komodtas organik) g. Kerjasama kemitraan h. Bantuan permodalan i. Bantuan pemasaran, j. Membangun keunggulan perwilayahan komoditas pertanian, k. pengembangan kawasan usaha agro terpadu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangi alih fungsi lahani. 6. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan 7. Ketenaga Kerjaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan kualitas TK 2. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan
--	--	--	--

		<p>Kualitas SDM relative rendah baik di pasar kerja TK dan aparatur sehingga Produktivitas TK rendah</p> <p>Sektor pariwisata Lampung khususnya wisata bahari dan alam yang sangat potesial tetapi belum dikembangkan secara optimal</p> <p>Dari sisi keuangan daerah, kinerja dan peran PAD terhadap total pendapatn daerah masih kurang. Ketergantungan fiskal pada pusat masih > 60%</p>	<p>industri/perusahaan.</p> <p>3. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.</p> <p>8. Program peningkatan ketertiban dan keamanan</p>
6	Gambaran Umum Upaya pemerintah daerah Thd perbaikan dan pembangunan daerah	<p>Upaya pemda Lampung untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan pembangunan di Propinsi Lampung tidak maksimal bahkan menuju <i>auto pilot</i>. Tidak jelas akan kemana pembangunan Lampung 5 tahun ke depan. Pembangunan di berbagai sektor di Lampung berjalan sendir-sendirii tanpa arah, tanpa kemudi, tanpa kordinasi, tanpa bahan bakar. Masyarakat berusaha sendiri mencari bantuan permodalan, pemasaran diupayakan sendiri, peluang usaha diupayakn sendiri dll. Kualitas jalan yang memburuk, akses jalan yang terbatas, masalah pasokan listrik yang tidak ada penyelesaian dll. Masing-masing SKPD menjalankan rutinitas tupoksinya saja tanpa inovasi untuk mengantisipasi kondisi yang saat ini sedang dan akan terjadi, SKPD bekerja tanpa koordinasi . Demikian juga hubungan pembangunan di 16 kab/kota, tidak ada koordinasi antara, antar kabupaten/kota dan antar kab/kota dengan propinsi, semua berjalan sendiri-sendiri bahkan tanpa inovasi (business as usual). Akibatnya perkembangan pembangunan di Lampung hanya "seadanya" sesuai usaha yang "seadanya"</p>	<p>Leadership Gubernur Lampung harus muncul. Gubernur Lampung harus berperan aktif ,tidak menunggu, tidak hanya tinggal diam Tetapi harus melakukan koordinasi pembangunan dengan baik. Koordinasi dengan SKPD nya maupun aktif berkoordinasi dengan kepala daerah seluruh kabupaten/kota se Propinsi Lampung. Gubernur harus mapu memberikan arahan akan kemana Lampung ke depan . membagi tugas dan wewenang utk menuju Lampung ke depan ApaPembangunan harus terintegrasi saling mengisi ,saling mendorong dan saling melengkapi .bukan berjalan sendiri-sendiri., melakukan memberikan arah Pemerintah daerah</p>

C. Rekomendasi DPRD Terkait Pelaksanaan RPJMD, Visi dan Misi KDH, Strategi dan arah Kebijakan daerah dan Tema serta Prioritas Pembangunan

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
1	Kesesuaian LKPJ dengan RPJP-D dan RPJM-D	<p>Konsep Visi, Misi, Strategi, Prioritas sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada</p> <p>Masalahnya adalah pada usulan program dan kegiatan yang tidak kongkrit menyelesaikan masalah yang dihadapi.</p> <p>Implementasi program/ kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dan tidak mengantisipasi masalah yang ada dan yang akan datang. Lebih banyak program /kegiatan yang sifatnya administrasi aparatur perkantoran bukan program/kegiatan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat</p> <p>Prioritas pembangunan daerah Lampung TA 2016 dibuat terlalu banyak, hingga 6 prioritas infrastruktur, investasi, reformasi, pertanian, kesehatan, pendidikan, sementara anggaran terbatas. Akibatnya tidak tercapai semua</p>	<p>Visi, Misi, Strategi, dan Prioritas harus dapat diuraikan /dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kongkrit yaitu program/kegiatan yang jelas bentuknya mau menyelesaikan persoalan apa.</p> <p>Prioritas pembangunan daerah per tahun harus tertentu, tidak perlu terlalu banyak tetapi jelas apa yang akan dicapai dengan anggaran yang tersedia.</p>
3	Kesesuaian LKPJ dengan RKPD/RKPDP	Prioritas daerah selama tahun 2016 ada 6 bidang sehingga menyebar dan sulit tercapai dan tidak sesuai dengan RKPD	Panduan menentukan prioritas pembangunan harus dibuat, dimana prioritas dipilih yang mungkin dilakukan dan urgen harus dilakukan selama tahun ini
4	Korelasi Program Dengan kegiatan strategis dengan visi dan misi kepala daerah	Program yang dibuat sudah sesuai dengan visi dan misi yang dibuat tetapi implementasinya dalam kegiatan yang tidak sesuai	Perlu perbaikan dan arahan dari kepala daerah dengan mau dibawa kemana Lampung ke depan dan khususnya tahun depan?

5	Keterkaitan LKPJ dengan strategi dan Kebijakan Umum Daerah	Strategi kebijakan pembangunan karena terlalu banyak sehingga sulit diwujudkan dan sulit diukur	Perbaiki strategi dan kebijakan pembangunan daerah
6	Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan dengan LKPJ	Prioritas daerah selama tahun 2016 ada 6 bidang sehingga menyebar dan sulit tercapai dan tidak sesuai dengan RKPD. Sehingga pada tataran implemnatsi kebijakan jadi meluas dan kehilangan arah	Perlu segera dibenahi agar tidak salah arahjatau kehilangan arah dan kehilangan momentum ini

D. Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan KU Pengelolaan Keu-Da ,Pengelolaan Pendapatan Daerah , Pengelolaan Belanja dan Pengelolaan Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
1	<p>Pelaksanaan KU Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Kebijakan Pengelolaan Keu Daerah: Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> validasi datapemutakhiran data/data base, kulaitas dan jangkauan layananIT Koordinasi dengan SKPD dan pusat, Penyederhanaan mekanisme pelayanan 	<p>Sistem informasi keuangan yang ada belum mampu secara optimalkan menggali potensi sumber keu daerah, program/kegiatan tdk kreatif dan inovatif ,sumber pendapatan masih konvensional</p> <p>Aturan yang berubah ubah terutama pada Sistem Informasi Pengelolaan keu Daerah (SIPKD)</p> <p>Data dan inforasi dari SKPD masih terlambat</p> <p>Komitment aparatur msh rendah</p> <p>Minim tenaga akuntan yang pintar computer</p> <p>Tidak berlakunya saknsi bagi SKPD yang lambat berikan informasi dan data Belum ada upaya pengembangan sumber pendapatan baru spt BUMD infras, wisata alam ,wisata kuliner,wisata konservasi</p>	<p>Dinas terkait harus mengoptimalkan potensi sumber keu daerah melalui system informasi yang ada, data yang sudah ada dan terbangun shg tercipta transparansi dan akuntabilitas</p> <p>Optimalisasi anggaran (belanja dari pusat: dekonsentrasi/tugas pembantuan, dana bagi hasil(, dana perbankan dan investasi swasta</p>

2	<p>Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<p>Kinerja Pencapaian Target :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target pendapatan secara menyeluruh sejak tahun 2012 s/d 2016 tidak tercapai. Tahun 2015 target = Rp 4,9 T realisasi Rp 4,7T (atau tercapai 96,03%) demikian juga target tahun 2016 = Rp 5,825 T realisasi Rp 5,585 T (atau tercapai 95,87%) Namun ada peningkatan Pendapatan sebesar 16,62% dibandingkan tahun 2015 dari Rp 4,789 T menjadi Rp 5,585 T atau Rp 795,9 milyar 2. Target PAD tidak tercapai bahkan turun dibandingkan tahun 2015. 95% mnenjadi 86% 3. Sumbangan PAD thd Total pendapatan Th 2016 = 4,2%, turun dibandingkan tahun 2015 = 4,69% 4. Realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2015 = Rp 4,789 T menjadi Rp 5,585 T atau naik 5. Dana Perimbangan turun dari target Rp 3 T terealisasi hanya Rp 1,78 T 	<p>Mencari alternative sumber-sumber pendapatan baru yang kreatif dan inovatif tanpa menekan dunia usaha mis : BUMD infras, wisata alam ,wisata kuliner,wisata konservasi, intesifikasi dan ekstensifikasi tanpa merugikan masy dan iklim investasi,peningkatan kulaitas SDM</p>
	<p>Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah:</p> <p>Arah Kebijakan Umum keu Da TA 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan anggaran kinerja 2. Anggran belanja langsung utk menjalankan fungsi fungsi pelayanan umum pemerintahan 3. Anggaran belanja tidak langsung utk menunjang kelancaran tugas pemeintahan 	<p>Target belanja daerah tidak tercapai dari Rp 5,2 T hanya terealisasi Rp 4,7 T atau 90%</p> <p>Belanja Daerah Th 2016 relaisasi Rp 4,779 T dengan pembagian B.Tidak langsung = Rp 3,34 T (70%),Belanja Langsung Rp 2,131 T atau 30%. Dari Belanja Langsung tsb utk belanja modal Rp 1 T atau 20%</p> <p>Kondisi APBD 2016: Surplus = Rp (5,582T – Rp 4,779T) = Rp 803 milyar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan daya serap anggaran b. Belanja yang lebih urgent c. Porsi belanja langsung harus lebih berimbang dibanding belanja tidak langsung d. Belanja pegawai dikurangi ,belanja modal ditingkatkan

	4. Pengendalian internal	Pembiayaan = (102 M – 10 M) = Rp 92 M SILPA = 803 M + Rp 92 M = Rp 102 M	
	Pelaksanaan KU Pengelolaan Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah		

E. Rekomendasi Terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah , Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pilihan

1. Pendidikan

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Angka Melek Huruf, meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal yang bermutu.	97%	98,70% realisasi fisik kegiatan	-	Ada 4 kegiatan yang belum bisa menggambarkan capaian peningkatan AMH dan berapa jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal di tahun 2016.	
Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu	Persentase ketercapaian SPM Pendidikan Dasar Kab/kota dan Satuan Pendidikan.	40%	100% realisasi fisik kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada 7 kegiatan dan capaiannya tidak bisa menggambarkan ketercapaian SPM pendidikan dalam RKPD 2016. ▪ Nama program berbeda dengan RPKD 2016. 	
Pendidikan luar biasa	Setiap kab/kota melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.	82%	90% Realisasi fisik kegiatan	-	Capaian tidak menggambarkan pelaksanaan PKLK di setiap kab/kota secara kuantitas dan kualitas.	
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Rasio Jumlah Ruang lab dan perpustakaan/Jumlah SMP, SMA, SMK dan sarana prasarana lainnya.	66%	100% realisasi fisik	-	Capaian hanya terpenuhinya alat lab SMA dan perbekalan mahasiswa, capaian tersebut tidak menggambarkan indikator yang diminta dalam RKPD 2016.	

2. Kesehatan

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Rawat Jalan puskesmas	15%	100% realisasi fisik	-	Capaian tidak menggambarkan indikator cakupan rawat jalan puskesmas secara kuantitatif maupun kualitatif.	
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persalinan oleh Tenaga kesehatan terlatih	92%	100% realisasi fisik kegiatan	-	Capaian kegiatan tidak sejalan dengan indikator dalam RKPD 2016.	
Upaya Kesehatan Tradisional	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif	45 UT	100% realisasi fisik	-	Kegiatan dan capaian tidak sejalan dengan indikator dalam RKPD 2016	

3. Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	-	-	86% realisasi kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak jelas capaian indikator LKPJ dengan RKPD 2016 Belum apa hasil prestasi bidang olahraga dengan program tersebut. 	
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	-	-	95,89% Realisasi kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak jelas capaian indikator LKPJ dengan RKPD 2016 Belum apa hasil prestasi bidang olahraga dengan program tersebut. 	

4. Penanaman Modal

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Penyelenggaraan Pelayanan	Lembar izin penanaman modal	15.000 dokumen	13.740 dokumen	-	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi target dokumen tidak tercapai. 	

Perizinan Terpadu					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum menggunakan/adopsi standar layanan menurut uu 25/2009 ttg layanan publik dan target perbaikan/ mempertahankan capaian zona kepatuhan uu pelayanan publik. ▪ Indikator belum menyentuh substansi reformasi layanan birokrasi seperti esensi layanan terpadu, zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 	
-------------------	--	--	--	--	---	--

5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Penyusunan informasi bidang dukcapil	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.	100%	95,46%	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada informasi akurat jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP dan mana yang belum di Lampung. 	
Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Dukcapil	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.	100%	95,46%	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi tidak berjalan optimal, karena masih banyak permasalahan e-KTP di berbagai kab/kota di Lampung. 	

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Peningkatan pemberdayaan	Terbentuk dan berjalannya kelompok	45%	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan dan capaian Tidak sejalan dengan indikator 	

ekonomi dan kesejahteraan perempuan	ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung					dalam RPJMD, yaitu Terbentuk dan berjalannya kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pencegahan trafficking, KDRT dan pelecehan seksual	Terbentuk dan terlaksananya kebijakan perundang-undangan ttg trafficking, KDRT, dan tindak kekerasan kepada seluruh pemangku kepentingan di kab/kota.	50%	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kejelasan secara kuantitatif penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak 2015 hingga 2016. Penjelasan kontribusi program dan kegiatan terhadap penurunan kasus KDRT di Lampung tidak ada.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Berjalannya peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan	52%	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian tidak sejalan dengan RPJMD dan RKPD yang substansinya pada Berjalannya peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan
Penguatan kelembagaan PUG dan anak	Terbentuknya Perda PUG, focal point dan pokja PUG di seluruh kab/kota di Provinsi Lampung	60%	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian tidak sejalan dengan RPJMD dan RKPD yang menekankan pada Terbentuknya Perda PUG, focal point dan pokja PUG di seluruh kab/kota di Provinsi Lampung
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Terbentuknya forum anak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.	60%	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian tidak sejalan dengan indikator kinerja dalam RPJMD, yaitu Terbentuknya forum anak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung
Catatan Umum:						
1. Berdasarkan RPJMD ada 6 program, tapi hanya dilaksanakan 5 program, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan						

perempuan tidak dilaksanakan.
 2. Ada kegiatan dan capaian yang tidak sesuai, tidak sinkron, dan tidak selaras dengan RPJMD dan RKPD seperti Program Penguatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Politik yang merupakan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD.

7. Kesbangpol Dalam Negeri

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Program Pembinaan Ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatkan koordinasi dan peran institusi dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan pembauran bangsa di Provinsi Lampung	100%	-	-	▪ Selaras dengan RPJMD dan RKPD	
Program Penanganan Konflik	Meningkatkan koordinasi dan peran institusi/ lembaga pemerintah dalam deteksi dini, cegah dini, lapor cepat dan penanganan konflik.	100%	-	-	▪ Selaras dengan RPJMD dan RKPD	
Program Pengendalian Stabilitas Daerah	Terciptanya koordinasi yang baik dan harmonis antara Pemda Provinsi Lampung dengan Intelkam dan Mitra Kerja Bidang Kesatuan Bangsa se- Provinsi Lampung	100%	-	-	▪ Selaras dengan RPJMD dan RKPD	
Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Meningkatkan kemandirian dan peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi nirlaba dalam peningkatan ideologi dan pendidikan politik masyarakat	100%	-	-	▪ Kegiatan dan capaian tidak sesuai dengan indikator kinerja dalam RPJMD, yaitu tentang kemandirian dan peran ormas dan organisasi nirlaba dalam peningkatan ideologi dan pendidikan politik.	
Catatan Umum:						

1. Berdasarkan RKPD 2016, ada 11 Program yang harus dilaksanakan, namun hanya 5 yang dijalankan oleh Badan Kesbangpol.
2. Ada program yang terabaikan seperti Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dimana memiliki nilai strategis untuk pencegahan konflik.
3. Belum mencantumkan indeks yang mengukur keberhasilan daerah pembangunan demokrasi (Indeks Demokrasi), penurunan konflik sosia (indeks penurunan konflik).

8. Tata Pemerintahan Umum

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Pelayanan kedinasan KDH	Peningkatan pelayanan kedinas KDH	100%	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro tata pemerintahan umum menjalankan misi reformasi birokrasi seperti inovasi layanan perijinan, pelayanan prima, hubungan antar pemkab/pemkot dengan pemprov berjalan harmonis, integratif, efektif, dan efisien, namun kenyataan reformasi berjalan lambat dan hubungan integratif dan harmonis belum optimal terwujud antara pemprov dengan pemkab/pemkot. 2. Ada program di RKPD dan RJMD yang tidak dilaksanakan, yaitu Program Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Program Penataan Adm Kependudukan dan catatan sipil serta program Pengembangan wilayah perbatasan. 3. Belum ada upaya serius pelaksanaan agenda reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas layanan publik sesuai uu 25/2009, target zona kepatuhan uu layanan publik, mengadopsi zona integritas 	
Administrasi perkantoran	Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi	100%	-	-		
Peningkatan peran gubernur sebagai wakil daerah	Terlaksananya penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan se-Provinsi Lampung	100%	-	-		

					WBK dan WBB.	
--	--	--	--	--	--------------	--

9. Otonomi Daerah

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam meningkatkan pembangunan daerah	100%	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian tidak progresif berkaitan dengan target jumlah kuantitatif kerjasama dan realisasinya, baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. 	
Pengembangan data/informasi	Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan Kementerian Departemen terkait serta memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada SKPD se-Prov. Lampung	100%	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan LKPJ Tahun 2016 berkualitas buruk dengan ciri: disampaikan dengan bahasa umum, tidak detail sesuai indikator, tidak merujuk RKPD secara optimal, tidak memuat jelas indikator kinerja urusan dan program seperti lokasi, target, dan pagu dana, dokumen tebal, bertele-tele, dan kurang menarik dibaca. 	

10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban	100%	100%	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada indikator yang lebih tepat untuk menggambarkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, agar kegiatan dan anggaran lebih tepat sasaran (ada dampak dan manfaat) 	

					<p>dimasyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berpotensi besar terjadi pemborosan anggaran, akibat program, kegiatan dan indikator yang tidak jelas arahnya. 	
Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, tertib sosial serta penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	95%	95%	-	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian abstrak dan tidak detail serta jelas terkait dengan terwujudnya trantibum di Lampung. Berpotensi besar terjadi pemborosan anggaran, akibat program, kegiatan dan indikator yang tidak jelas arahnya. 	
Program penegakkan peraturan perundang-undangan	terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, tertib sosial serta penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	100%	97%		<ul style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan ini tidak terdapat dalam RKPD 2016. 	

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa.	Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Kab/kota			<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki indikator kinerja program yang detail. Apa hasil dan manfaat pengembangan data IKD? 	
Program	Terwujudnya lembaga	125 desa			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian tidak 	

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	ekonomi pedesaan yang maju dan mandiri				<ul style="list-style-type: none"> mengarah pada indikator jumlah lembaga ekonomi pedesaan sejumlah 125 desa. Berapa jumlah lembaga ekonomi desa yang dikembangkan tidak ada. 	
<p>Catatan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam RKPD 2016, hanya ada 2 program, yaitu Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, sedangkan dalam LKPJ 2016 terdapat 6 Program Prioritas. Seluruh program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tidak memiliki capaian indikator secara kuantitatif dan kualitatif, seperti target perbaikan status desa di setiap tahunnya, termasuk tahun 2016 ini. (status desa terbelakang, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri). 						

11. Bidang Sosial

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah	Catatan Perbaikan
	Indikator	Nilai	Nilai	Dana		
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang terlantar dan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK PM) serta terpenuhinya kebtuhan dasar bagi korban bencana.	1 Tahun Kegiatan			<ul style="list-style-type: none"> Tidak jelas informasi tentang berapa orang, tipe tindak kekerasan apa, dimana lokasinya, dst. 	
Pembinaan anak terlantar	Meningkatnya keterampilan sosial dan keterampilan kerja anak putus sekolah terlantar, pelayanan kesejahteraan sosial bagianak terlantar serta pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak	1 Tahun Kegiatan			<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data kuantitatif jumlah anak yang dibina setiap tahunnya dan bagaimana hasil pembinaannya (manfaat dan dampaknya). Tidak sejalan dengan indikator program, yaitu peningkatan keterampilan, tidak ada informasi pelatihan apa, berapa anak dilatih, lokasinya, dst. 	
Pembinaan para	-				<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada dalam RKPD 2016 	

penyanggah cacat dan trauma						
Pembinaan panti asuhan/panti jompo	-					▪ Tidak ada dalam RKPD 2016
Pembinaan eks penyanggah penyakit sosial	-					▪ Tidak ada dalam RKPD 2016
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	-					▪ Tidak ada dalam RKPD 2016
Program keluarga harapan	-					▪ Tidak ada dalam RKPD 2016
Catatan Umum:						
1. Banyak program yang tidak ada dalam RKPD 2016.						
2. Semua program dan kegiatan tidak memiliki indikator program yang terukur dan sesuai substansi program, sehingga potensial menyebabkan pemborosan anggaran daerah dan mengancam kegagalan pencapaian visi dan misi dalam RPJMD.						

13. Bina Kesejahteraan Sosial/Bina Sosial Setda Lampung

Program	Indikator dan Nilai Indikator		Capaian		Identifikasi Masalah
	Indikator	Nilai	Nilai	Dan a	
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan dan pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100%			▪ Tidak jelas capaian dari kegiatan ini, lokasi dimana, unit yang dituju berapa, dan apa pertimbangannya.
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak	Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di Kab/Kota se-	20%			▪ Tidak ada dalam RKPD 2016 ▪ Tidak jelas peraturan apa saja yang diserasikan.

dan perempuan	Provinsi Lampung				
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial anak	Persentase terlaksananya koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan bidang sosial dan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100%			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian lebih banyak pada koordinasi, dan tidak ada muatan pemberdayaannya.
Perlindungan lembaga ketenaga-kerjaan	Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan di Provinsi Lampung	100%			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan capaian abstrak, tidak bisa diukur capaian keberhasilan program dalam menunjang visi dan misi daerah. Pemantauan tenaga kerja di daerah transmigrasi mana dan kaitan dengan tahun sebelumnya seperti apa. (2015 dimana, dan 2016 dimana).

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
14	LINGKUNGN HIDUP KABUPATEN/KOTA		
A	Pelayanan Pencemaran Air	Tidak ada	Harus diprogramkan Pelayanan masalah penengglangan Pencemaran Air
B	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara sumber tidak bergerak	Tidak ada	Harus diprogramkan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara sumber tidak bergerak
C	Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah produksi biomasa	Ada tapi belum menynginformasikan status kerusakan lahan	Perlu data status kerusakan lahan
15	PERHUBUNGN KABUPATEN/KOTA		
A	Pengawasan lebih muatan	Pengawasan lebih muatan tidak terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan jalan dan jembatan cepat rusak	Pemerintah harus serius melaksanakan tugas pengawasan. Perlu sikap jujur dan amanah.
B	Jembatan	Ada beberapa jembatan yang diperlukan masyarakat tidak tersedia/rusak	Pemerintah harus memprioritaskan keperluan masyarakat
C	Jalan	Jalan Provinsi tidak sedikit yang terbengkalai. Contoh: Mesuji, Pesawaran, Lampung Barat	Pemerintah perlu memprioritaskan jalan untuk memperlancar perhubungan

16	PU dan TATA RUANG KABUPATEN/KOTA		
A	Sumber Daya Air	Sumber daya air belum dimanfaatkan secara baik	Pemerintah perlu menyusun program yang inovatif dan nyata.
B	Jalan	Banyak jalan yang penting masih terbengkalai	Perlu langkah prioritas penengangan jalan yang strategis
C	Air Minum	Masih banyak masyarakat menggunakan air minum belum memadai	Perlu tindakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur
D	Sanitasi dan Persampahan	Sanitasi di dalam kota dan luar kota masih banyak yang di bawah standar sehat	Perlu penanganan terpadu
E	Pemukiman Kumuh Perkotaan	Masih banyak pemukiman kumuh	Perlu perhatian dan tindakan ekstra membangun
F	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Banyak Bangunan dan Lingkungan belum tertata dengan baik	Perlu ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan dengan jujur dan bertanggungjawab
G	Jasa Kontruksi	Masih banyak yang kurang memadai	Perlu pengawasan kontruksi yang benar dan berstandar
H	Penataan Ruang	Penataan ruang masih banyak dilanggar	Perlu pelaksanaan tindakan hukum yang tegas, benar dan bertanggungjawab
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah kualitas jalan 2. Muatan lebih 3. Pola dan sistem perencanaan jalan mengikuti ketersediaan anggaran 4. Ketersediaan anggaran tidak konsisten sehingga pengaruhi kondisi jalan 5. Realisasi Total Belanja= 601,7 M= Tidak langsung Rp 30,6 M = belanja pegawai 7,3 M+ belanja Modal 300 M+B.Barang =111,1M + B.Modal550,5M (sementara rencana belanja Rp 699,6M 	
17	PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA		
	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan	Perlu perhatian dan tindakan ekstra untuk membangun Rumah Layak Huni dan Terjangkau. Pemerintah perlu punya kiat kreatif yang efektif, inovatif
b	Lingkungan Sehat (PSU)	Masih banyak lingkungan yang kurang sehat	Perlu tindakan kreatif yang efektif, inovatif tidak bekerja tanpa konsep (hanya mengalir

		<ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya Harga bahan perumahan b. Kemiskinan a. Minimnya anggaran di sektor ini, b. Belum ada dokumen ttg pen taan ruang daerah (rencana detil tata ruang (RDTR) , rencana tata runag kawasan strategis, sbg dasar /panduan dalam rancang bangun kawasan dan arah investasi pd kawasan stratergis dan belum ada data spasial perencanaan tata ruang, perda RTRW c. Koordinasi masih kurang d. Masih kurang paham pada pemanfaatan perencanaan tata ruang e. Pengawasan masy masih kurang ddlm memberikan infomrasi pemanfaatan ruang 	<p>apa adanya), hanya mengikuti keadaan alam</p> <p>Perlu segera dibuat dokumen tentang penataan ruang</p> <p>Tingkatkan koordinasi</p>
18	ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN/KOTA		
	Lampung kaya energi dan sumber daya mineral, Lampung memiliki 4 blok cadangan minyak , 17 titik sumber panasbumi, batu bara dan emas	Banyak sumber energi dan sumber daya mineral Yang belum dikelola dengan baik	Pemerintah perlu aktif, kreatif, jangan pasif, diam saja
19	KOMUNIKASI IFORMASI dan STATISTIK KABUPATEN/KOTA		
		Transportasi on line perlu diantisipasi kaena akan menjadi keunggulan dan masalah	Perlu penangan Transportasi on line agar menjadi keunggulan dan tidak menimbulkan masalah. Pemerintah jangan keduluan oleh alam/kenyataan
		<ul style="list-style-type: none"> 1. SKPD jarang memanfaatkan jaringan komiunikasi dan informasi dari dinas ini 2. Sarpras sangat minim 3. Kurang kendaraan operasional 	

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kurang tenaga IT dan media Centre tenaga tehnik computer 5. Kurang koordimasi utlk up date 52 SKPD 	
20	PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN KABUPATEN/KOTA		
A		Daya baca masyarakat kurang	Pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk menggerakkan masyarakat agar gemar membaca
		Kearsipan belum sempurna	Pemerintah perlu memperbaiki sistim kearsipan dan meningkatkan kemampuan tenaga kearsipa
21	PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA		
		penanaman modal masih rendah banyak kekayaan alam belum bias dimanfaatkan	Perlu langkah kreatif, inovatif dan payung hukum yang jelas dan pasti
22	PENELITIAN dan PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA		
		penelitian dan pengembangan masih lamban	Pemerintah perlu meningkatkan gairah penelitian dan pengembangan dengan menggandeng perguruan Tinggi
		<ul style="list-style-type: none"> a. Program nya lebih banyak adm b. Penelitian/kajian terbatas dan ide balitbangda bukan pesanan atau kebutuhan SKPD c. Masing-masing SKPD meneliti sendiri d. Beberapa dokumen sudah jadi antara lain kajian ttg pembangunan ntechnopark dan scien park, analisis prod beras siger dll ttp tidak dimanfaatkan Bappeda e. Seharusnya seluruh kajian RDRTW dibuat di lembaga ini 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran dan fungsi DRD (Dewan Riset Daerah) b. Seharusnya seluruh kajian kajian termasuk RDRTW dan seluruh kebijakan Pemda Lampung dibuat dan dikaji dari lembaga ini
23	PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		

A	Kebakaran, pohon tumbang,	Selalu terjadi	Pemerintah perlu menyusun metode strategi antisipasi penanggulangan (bukan bertindak setelah terjadi)
B	Bentrok warga, Premanisme, anarkis, insiden	Sikap masyarakat, budaya yang masih terbelakang	Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan, moral dan budaya masyarakat yang bersangkutan
C	Banjir, Tanah longsor, kerusakan jembatan, tanggul jebol	Banyak dan Selalu terjadi	Pemerintah perlu menyusun metode strategi antisipasi penanggulangan (bukan bertindak setelah terjadi)
D	Puting beliung, gempa bumi,	Pasti ada	Pemerintah perlu menyusun metode strategi antisipasi penanggulangan (bukan bertindak setelah terjadi)

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
24	BAPPEDA Ra-kor Gub se sumatera, Musernbang, koordinasi perencanaan pembangunan dan pembautan kajian/dokumen	Masalah secara umum dlm perencanaan pembangunan : a. Pembangunan antar kab/kota di Lampung berjalan sendiri-sendiri kurang koordinasi Propinsi utk menyusun prioritas pembangunan sehingga arah dan hasil pembangunan tidak maksimal b. SKPD kurang memahami untuk mengoperasionalkan RPJM-D menjadi → Renstra SKPD menjadi → RKPD . Akibatnya program-program kurang sejalan antar SKPD dan antar kabupaten/kota c. Belum serasinya program propinsi dengan program pemerintah pusat d. Koordinasi masih kurang antara kab/kota e. Perencanaan antar kab/kota tidak terintegrasi	Dari sisi laporan, secara umum laporan sudah dilaporkan dengan baik karena seluruh program dan kegiatan dijelaskan capaiannya dan semuanya tercapai Perlu ditingkatkan koordinasi antara propinsi dengan Kab/kota , antar SKPD dan antar program pusat dan propinsi
25	PENANAMAN MODAL		

	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi dan kerjasama investasi b. Peningkatan iklim investasi c. Peningkatan kualitas layanan public 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah realisasi investasi PMDN di Propinsi Lampung baru Rp 6 Trilyun dan PMA baru Rp 1,1 T b. Investor belum banyak berminat karena infrastruktur supply listrik c. Informasi kurang ttg potensi wisata daerah d. Kekhawatiran investor sejak otda (kepastian usaha, insentif bagi investor, e. Programnya copaste tidakkreative,tidak jelas investasi apa yang dirprioritaskan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu upaya yang sistematis dari BPM Prop Lampung agar PMA dan PMDN yang masuk ke Lampung utk menanamakan modal meningkat signifikan sesuai dengan potensi Lampung yang ada b. Tingkatkan upaya-upaya promosi potensi investasi di lampung dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
26	KOPERASI DAN UMKM		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengambangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM ? 2. Perkuatan modal UMKM 3. Peningkatan kulaitas SDM Ko dan UMKM 4. Perkuat kelembagaan Kop dan UMKM 5. Data keragaan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi perkembangan Koperasi di prop Lampung hingga tahun 2016 kurang berkembang secara signifikan. Jumlah koperasi aktif hanya 3024 unit , sementara yang tidak aktif sebanyak 2296 unit (mati suri).. b. Kondisi perkembangann UMKM Formal sebanyak 173.591 c. Sudah Rp 50 M dana bergulir ke BLUD yang disalurkan ke 2286 unit UMKM d. Hal ini akibat masih rendahnya akses modal bagi koperasi (bantuan modal, prona dll) 6. Rendahnya partisipasi anggota koperasi sehingga kegiatan perkoperasiaan masih terbatas dan masih konvensional 7. Program dan kegiatan yang dilakukan hanya pengulangan semata, dan masih banyak yang bersifat penyuluhan dan sosialisasi aturan dan Mgt 	<ul style="list-style-type: none"> a. Harus ada upaya yang sungguh sungguh untuk membina Koperasi dan UMKM terutama bantuan tehnis dan bantuan permodalan dan pemasraana b. Program dan kegiatan harus inovatif dan kreatif bukan pengulangan semata

27	KETENAGA KERJAAN		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan dan kinerja lengkap b. Peningkatan kualitas dan produktivitas TK (kompetensi tenaga di BLK di beberapa kab/kota, pembinaan lembaga pelatihan kerja, pemagangan kerja, ketrampilan berbasis kompetensi) c. Pengembangan kewirausahaan d. Peningkatan kesempatan kerja (pembinaan TK di DN dan LN) e. Perlindungan ke TK f. Program HI g. Data TK dan Informasi (profil ke TK, penyusunan dok perencanaan TKO h. Pembinaan dan pengujian K3 (pembinaan dan monev) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Karena anggaran terbatas ketrampilan TK dan kompetensi TK terlatih jumlahnya tidak sesuai dengan fakta yang membutuhkannya b. Bagaimana seleksi TK yang dilatih tidak jelas mis 70 orang dilatih, apa dasarnya ? c. Tidak ada perencanaan d. Dinas TK bukan penyedia TK, ttp memberikan <u>informasi kepada TK dan kepada prsh ttg TK terampil</u> e. Menjembatani kebutuhan ke TK oleh perusahaan f. Meningkatkan kompetensi pekerja g. Mengawasi K3 h. Masuknya TK asing illegal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Ketenaga kerjaan harus menjadi prioritas s pembangunan b. Anggaran untuk sektor Ketenag akerjaan harus ditingkatkan karena sektor ini harus menjadi prioritas pembangunan c. SKPD keTK harus lebih professional dan ditingkatkan kinerjanya sebagai jembatan perusahaan dan pencari ekerja
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan piutang pajak b. Mengembangkan Drive Thru c. Kinerja BUMD d. Aplikasi on line pada BBNKB e. Perbaiki data base pajak f. Pendataan piutang pajak dg door to door (hati hati costnya lebih tinggi dari penerimaannya) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi Pajak dan retribusi belum semua tergali khususnya pajak BBNKB dan PKB b. Perhitungan untuk memperoleh dana perimbangan perlu dilakukan dengan teliti sehingga dapat ditingkatkan c. Masih ada opini masy bhw bayar pajak sulit berbiaya tinggi, waktu pelayanan lama 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jangkauan pelayanan BBNKB dan PKB perlu ditambah c. Perlu membuat program program inovatif menggunakannIT, terutama dalam bidang pelayanan perpajakan dan retribusi sehingga kesan di masyarakat membayar pajak itu sulit, berbiaya tinggi, waktunya lama hilang
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya posko siaga bencana 1x24 jam b. Pemahaman bencana dan kesiapan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Minim SDM yang paham pasca bencana b. Tidak ada tenaga fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> c. Perlu antisipasi bencana alam (banjir, gempa bumi,) dnegan membuat SOP (siapa melakukan apa)

	pada : masyarakat pemuda Kepala desa, posko siaga banjir, c. Tenaga TRC ,perhitungan kerugian pasca bencana,. Normalisasi sungai way napal,	penanggulangn bencana	d. Penambahan anggaran
30	KETAHANAN PANGAN Prog: Diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan Kegiatan : a. Penerapan batas standar residu b. Desa mandiri pangan c. Pengembangan cad pangan daerah d. Pengembangan lumbung masy e. Penyusunan peta ketahanan pangan f. Pemberdayaan gapoktan utk stabilisais harga pangan g. Kegiatan akses pangan Pengawasan mutu dan keamanan pangan Pengawasan produk pertanian yg sdh tersertifikasi Promosi produk unggulan lpg Lomba cipta menu Promosi pangan segar dan olahan Percepatan panganeka ragaman pangan	a, Prog tidak jelas, apa yang didiversifikasi, pangannya atau ketahanan pangannya ? c. Belum ada data ttg indicator utk tentukan ttg situasi pangan dan gizi perkotaan d. Budaya masy yg blm mendukung keanegakragaman pangan e. Belumi dpt serifikasi labelisasi prima 3 (lahan,produk dan padahal sertifikasi itu jaminan utk masuk ke pasar MEA	Program harus jelas da kongkrit hingga sasarannya siapa dan outcomenya terukur Perlu segera dibuat dokumen dan indikator tentang situasi pangan dan gizi di masyarakat prop Lampungf untuk blue print ketahanan pangan ke sdepannya Pemda upayakan utk mendapatkan sertifikasi label prima untuk hasil prod ketananan pangan kita, sehingga bisa diperdagangkan di pasar MEA

F. REKOMENDASI DPRD TTG URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

No	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI
31	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	1.Pengembangan perikanan budidaya : A. Budidaya lele tech bioflock,	1. Ketersediaan alat tangkap termasuk kapal (sewa kapal),	a. Dinas terkait harus membuat program penyediaan input atau

	<p>bantuan benih ikan, pengembangan unit pembenihan, pembuatan pakan ikan mandiri, penguatan kelembagaan, budidaya di perairan umum,percontohan ikan hias)</p> <p>B. Pengembangan perikanan tangkap:</p> <p>a. Pembangunan pelabuhan Bengkunat, bantuan paket penangkapan ikan, bimtek tekhn penangkapan ikan, revitalisasi alat tangkap ikan</p> <p>C. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan:</p> <p>D. Sertifikasi jaminan mutu utk ekspor,pemanfaatan terminal agrobisnis,</p> <p>E. System informasi kelauatan dan perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan bahan bakar dengan harga bahan bakar utk kapal 3. Ketersediaan es batu dan harga es 4. Ketersediaan Cold sotarge 5. Masalah permodalan 6. Masalah illegal fishing 7. Masalah penanganan pasca panen di tengah laut (packing ,icing 8. Masalah pemasaran krn di Lampung belum ada pabrik pengolah ikan 9. Tingkat pendidikan SDM perikanan yang masih rendah 	<p>bahan untuk pengembangan sektor ini seperti : modal utk sewa kapal, bahan bakar dengan harga terjangkau ,es batu, cpld storage</p> <p>b. Pemda harus buat program yang inovatof utamanya untuk pasca panen</p> <p>c. Pemda harus membantu pemasarannya</p> <p>d. Meningkatkan pendidikan SDM Perikanan dan kelaiutan</p>
32	PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lahan perkebunan 2. Umur tumbuhan yang sudah tua sehingga tidak lagi produktif (lada, karet, sawit 3. Harga komoditas perebunan yang belum stabil 4. Akses pasar dibatasi oleh pengumpul dan dibatasi oleh mereka sehingga tidak bisa langsung 5. Masalaah kualitas komoditas hasil pertanian((tehnik pasca panen buruk) 6. Masih dijual dalam bentuk mentah (raw) belum diolah secara pabrikan sehingga harga jual murah 	
33	KEHUTANAN		

		<ul style="list-style-type: none"> A. Keterbatasan lahan hutan B. Perambahan hutan C. Harga komoditas hasil hutan yang belum stabil D. Pemanfaatan hutan sebagai tujuan wisata belum dikembangkan 	
34	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan /destinasi wisata dan objek-objek wisata di Lampung masih belum jelas (<i>grand design</i>) b. Pengelolaan wisata di Lampung belum optimal c. Infrastruktur ke arah lokasi wisata masih kurang (jalan,internet, money changer .souvenir) d. Kesadaran masyarakat terhadap wisatawan masih kurang e. Belum ada paket-paket wisata yang bisa dijual f. Promosi wisata masih kurang g. Koordinasi dengan agent agent perjalanan dalam dan luar negeri , h. Koordinasi dengan ASDP utk penyeberangan masih kurang i. Transportasi menuju destinasi wisata belum terstruktur j. SDM 	

G. KESIMPULAN DAN HARAPAN

Secara umum, LKPJ ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Lampung sudah BAIK, namun dengan beberapa catatan, yaitu :

1. Menjalankan pembangunan ini harus lebih bersungguh-sungguh, lebih focus dan terarah
2. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi antara pemerintah propinsi dengan seluruh kabupaten/kota se propinsi Lampung serta dengan seluruh SKPD di bawahnya harus ditingkatkan sehingga terarah dan terintegrasi

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Ir. Hl. JOMAN SULAIMAN, M.M